

ABSTRAK

Kenakalan anak telah banyak menjurus pada tindak pidana. Di Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum akan diproses dengan pedoman UU SPPA yang berfokus terhadap penyelesaian perkara menggunakan sistem diversifikasi. Salah satu hasil kesepakatan diversifikasi adalah pengembalian anak kepada orang tua/wali. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses dan efektivitas pengembalian anak kepada orang tua/wali serta rekomendasi kebijakan di masa yang akan datang.

Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer berupa wawancara sebagai data utama. Data primer tersebut akan ditandingkan dengan data sekunder berupa UU SPPA serta berbagai peraturan pelaksanaannya untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. Untuk dapat merumuskan rekomendasi kebijakan bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, digunakan studi komparasi dengan sistem peradilan pidana anak Negara Jepang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pelaksanaan diversifikasi belum berjalan dengan optimal dikarenakan UU SPPA beserta berbagai peraturan pelaksanaannya belum dapat mengakomodir kebutuhan pedoman bagi Aparat Penegak Hukum. Permasalahan pada praktik seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran Pembimbing Kemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum dan Orang Tua terkait peran penting masing-masing pihak serta kurangnya sarana prasarana penunjang, mengakibatkan pembimbingan terhadap anak tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, berdasarkan hasil studi komparasi dengan sistem peradilan pidana anak Negara Jepang, dirumuskan berbagai rekomendasi kebijakan baru seperti pelimpahan tanggung jawab kepada orang tua/wali, penggunaan langkah preventif, serta penyempurnaan pelaksanaan diversifikasi.

Diperlukan berbagai langkah konkrit guna menyelesaikan permasalahan ini, diantaranya dengan melakukan pembaharuan dalam UU SPPA, meningkatkan kualitas SDM Aparat Penegak Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta penanaman pemahaman dan kesadaran tanggung jawab orang tua/wali.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengembalian Anak Kepada Orang Tua/Wali, Diversifikasi.

ABSTRACT

Delinquency among children has led to many criminal acts. In Indonesia, children in conflict with the law will be processed under the guidelines of the SPPA Law, which focuses on resolving cases using a diversion system. One of the outcomes of the diversion agreement is the return of the child to the parent or guardian. The writing of this law aims to find out the process and effectiveness of returning children to parents or guardians, as well as make policy recommendations for the future.

This research in legal writing uses an empirical juridical approach, with primary data in the form of interviews as the main data source. The primary data will be matched with secondary data in the form of the SPPA Law and various implementing regulations to be able to answer research problems. To be able to formulate policy recommendations for the juvenile criminal justice system in Indonesia, a comparative study with the juvenile criminal justice system of Japan is used.

Based on the results of the study, it is known that the diversion implementation process has not run optimally because the SPPA Law and its various implementing regulations have not been able to accommodate the need for guidelines for law enforcement officers. Problems in practice, such as a lack of understanding and awareness of the important roles of community supervisors, law enforcement officers, and parents, and a lack of supporting infrastructure, result in the lack of effective guidance for children. Therefore, based on the results of a comparative study with the juvenile criminal justice system of the Japanese State, various new policy recommendations were formulated, such as the delegation of responsibility to parents or guardians, the use of preventive measures, and the improvement of the implementation of diversion.

Various concrete steps are needed to solve this problem, including updating the SPPA Law, improving the quality of human resources among law enforcement officers and community advisors, and instilling an understanding and awareness of parent and guardian responsibilities.

Keywords: Effectiveness, Return of The Child to Parent/Guardian, Diversion.